

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Kudus

Halaman 5 dan 10

Anggaran TPG Pusat Mengendap

Senilai Rp 2,29 Miliar Disimpan di Kasda

KUDUS - Anggaran Tambahan Penghasilan Guru (TPG) di Kabupaten Kudus selama tahun 2017 hingga Agustus 2018, ternyata tidak dicairkan oleh pihak Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) setempat. Alasannya, para guru lebih memilih mengamb-

bil uang Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) daerah yang besarnya mencapai Rp 1,5 juta per bulan per orang.

Kepala BPPKAD Kudus Eko Djumartono mengatakan, selama ini para guru boleh memilih salah satu uang tunjangan yang akan dicairkan sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Kudus.

"Ternyata mereka banyak yang mengambil uang TPP daerah, yang nilainya lebih besar dibanding uang TPG dari Pemerintah Pusat yang nilainya Rp 250 ribu

per bulan per orang," ujar Eko.

Dari opsi yang diberikan tersebut, kata Eko, para guru lebih

memilih mencairkan TPP daerah yang lebih besar nominalnya.

"Maka uang TPG dari Pemerintah Pusat mengendap sampai Rp 2,29 miliar dan tidak bisa dicairkan," kata Eko kemarin.

Karena masih ada anggaran TPG yang mengendap di Kasda Kudus, maka Pemerintah Pusat sudah menghenti-

► Baca **ANGGARAN...** 10

kan penyaluran anggaran TPG ke Kabupaten Kudus.

"Sudah dihentikan dan tidak ditransfer lagi. Sampai sekarang pun uang tersebut tidak kami pakai," tambahnya.

Sedangkan terkait uang Tunjangan Profesi Guru triwulan pertama dan kedua tahun ini, imbuh Eko, sudah dicairkan dan ditransfer ke rekening masing-masing guru.

"Total uang yang dicairkan untuk triwulan pertama sebesar Rp 39,9 miliar. Sedangkan total uang triwulan kedua yang dicairkan

sebesar Rp 39,5 miliar," paparnya.

Ia menjelaskan, perbedaan pencairan yang terjadi pada triwulan pertama dan kedua tersebut, karena data yang disetorkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kudus juga berubah.

Sebab sebelum disetorkan ke BPPKAD, Disdikpora melakukan verifikasi ulang dan ditemukan sejumlah guru pensiun, pindah dan masalah lainnya.

"Setiap triwulan data selalu berubah, ada yang sudah pensiun, pindah ke daerah lain

atau persoalan lain. Sehingga nilai yang dicairkan juga berubah," ucapnya.

Disinggung mengenai tunjangan untuk guru madin, TPQ dan Guru Tidak Tetap (GTT) sekolah negeri, Pemkab Kudus berjanji masih akan mencairkan tunjangan tersebut.

Perincian tunjangan guru Madin dan TPQ per orang Rp 900 ribu per tahun. Selanjutnya untuk GTT Rp 1,5 juta per orang per tahun.

"Jika nanti ada perubahan, kami akan mengikuti kebijakan bupati yang baru," pungkasnya. (han/rif)